

Analisis Prioritas Belanja Dana Desa pada Desa Wisata Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara

Maulida Fitri*, Ali Wardhana

Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
*maulidafitri06@gmail.com

Abstract

Aims of this study are first, to discovery of the Process in Village Fund Budgeting Planning in Pulantani Village, Hulu Sungai Utara District second, to find out the appropriate spending priorities for village funds in developing Pulantani village, Hulu Sungai Utara District. The numerous participants in this study were 10 who affect village fund spending in Pulantani village that used Analytical Hierarchy Process method used in data processing. In conclusion, this study signifies the option of criteria for the RPJMDes, Villages' Potential and issues that affect the determination in that small townspending priorities in the order of selecting village fund spending priorities, namely Village Development 41.60%, followed by Community Empowerment 33.86%, followed by Community Development 16.54%, and the last is Village Administration of 8.62%. With the most dominant conclusion is Village Development 41.60%.

Keywords: Priority; Village Expenditure; Analytical Hierarchy Process Method

Abstrak

Penelitian ini bertujuan pertama, mengetahui Proses Dalam Perencanaan Penganggaran Dana Desa Pada Desa Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedua, mengetahui prioritas belanja dana desa yang tepat dalam membangun desa Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara. Responden dalam penelitian ini ada 10 informan yang dianggap berperan terhadap penentuan belanja desa di Desa Pulantani yang digunakan dalam pengolahan data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria dengan alternatif RPJMDes, Potensi Desa serta Permasalahan Desa berpengaruh dalam menentukan prioritas belanja desa dengan urutan pemilihan prioritas belanja dana desa yaitu pertama, Pembangunan desa 41,60%, kedua, Pemberdayaan masyarakat sebesar 33,86%, ketiga, Pembinaan masyarakat sebesar 16,54%, dan yang ke empat Penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 8,62%. Dengan kesimpulan dominan prioritas adalah Pembangunan Desa sebesar 41,60%.

Kata Kunci: Prioritas; Belanja Desa; Metode AHP

PENDAHULUAN

Kebijakan baru dana desa merupakan hasil pengembangan dari kebijakan sebelumnya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dalam melaksanakan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kualitas desa, kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa didukung oleh kepala desa dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD)(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, 2017)

Pemerintah Desa Pulantani menangani dana desa bernilai tinggi sekaligus mengatur prioritas penggunaan dana desa. Terdapat permasalahan dalam implementasi ini, seperti keterlambatan dalam menentukan skala prioritas yang akan diambil. Dana aliran pendapatan dengan jumlah yang besar seharusnya memiliki pengelolaan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan bagi masyarakat desa. Dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan

desa yang terintegrasi, akan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, permasalahan yang terjadi pada pengelolaan belanja Dana Desa Pulantani yaitu menentukan urutan prioritas belanja desa yang akan dijalankan untuk meningkatkan pembangunan desa.

Belanja Desa di Desa Pulantani, Kecamatan Haur gading Kabupaten Hulu Sungai Utara terus mendominasi dalam bidang pemerintahan desa, sedangkan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masih belum optimal. Pasalnya, prioritas pengeluaran Desa Pulantani selama ini diputuskan dalam rapat BPD tanpa mempertimbangkan kriteria keputusan.

Fokus pada penelitian ini adalah pada penentuan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan informasi laporan dana Desa Tahun 2020. Hasil akhir dari implementasi sistem dana desa ini dapat dikatakan efektifitas pembangunan dari berbagai perspektif, baik itu sebuah pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem pendukung keputusan dengan metode AHP untuk menentukan urutan kepentingan penggunaan sumber daya desa. Sehingga, dengan adanya sistem pendukung keputusan yang bertujuan untuk membantu perangkat desa menentukan prioritas kegiatan desa dalam pembangunan desa dan memudahkan pengambil keputusan. Oleh karena hal tersebut terdapat kekurangan, menarik bagi penulis untuk meneliti “Analisis Prioritas Belanja Dana Desa pada Desa Wisata Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara”

Permasalahan-permasalahan utama yang dibahas pada penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana proses perencanaan penganggaran dana desa pada desa pulantani kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedua, Berapa alokasi dana desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sampai 2021 pada desa Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketiga, bagaimana prioritas belanja dana desa yang tepat dalam membangun desa Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui proses dalam perencanaan penganggaran dana desa pada desa Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedua, untuk mengetahui dana desa yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sampai 2021 pada desa Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketiga, untuk mengetahui prioritas belanja dana desa yang tepat dalam membangun desa Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PENELITIAN TERDAHULU

Desa dan Pemerintahan Desa

Secara etimologis, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa, yang berarti kampung halaman. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kekuasaan memerintah dan bertempat tinggal dalam rumah tangga sendiri berdasarkan hak-hak adat serta kebiasaan yang diakui oleh pemerintah negara.

Menurut Widjaja (2003) Pemerintah Desa diartikan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan negara, yang memberikan kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan musyawarah desa dan mengirimkan laporan pelaksanaan kepada kepala daerah.

Dana Desa

Dana desa adalah didapatkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa, yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, serta digunakan untuk rumah tangga desa (Rakhmatullah, 2020). Dengan tujuan untuk mendistribusikan ekonomi secara merata di antara desa-desa dan mengatur pembangunan dan layanan masyarakat (Putera & Saleh, 2019)

Belanja Desa

Pengeluaran desa lebih diprioritaskan untuk melengkapi segala hal yang terkait pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dengan meliputi kebutuhan primer, pelayanan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Prioritas Dana Desa

Sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19 prioritas dana desa ditujukan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Risma Hafid (2017) dengan judul Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016 dengan menunjukan hasil yang efektif dibuktikan dengan terealisasinya program-program sesuai dengan yang telah disepakati dalam musrenbang.

Penelitian dari Riska Apriliana(2017) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance menghasilkan kesimpulan dalam mengelola alokasi dana desa telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun secara teknis masih adanya kendala.

METODE

Ruang lingkup penelitian berfokus di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Haur Gading, Desa Pulantani dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan jenis data ordinal. Data ordinal merupakan data yang disusun berdasarkan besarnya secara berjenjang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Peneliti mengambil sampel 10 responden dengan menggunakan sistem pengambilan Non-Probability sampling dan teknik Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus orang yang ahli atau berpengaruh di Desa Pulantani berdasarkan penggunaan metode Analytical Hierarchy Process..

Definisi variabel dalam penelitian ini, adalah : Pertama, penyelenggaraan pemerintah desa adalah suatu proses yang diselenggarakan oleh Desa Pulantani, yang terdiri dari tahapan-tahapan dimana BPD dan unsur masyarakat melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Kedua, pembangunan desa adalah usaha dalam meningkatkan taraf dan kualitas hidup demi kesejahteraan masyarakat desa Pulantani dengan mendukung masyarakat sekitar seperti prasarana maupun sarana. Ketiga, pemberdayaan masyarakat adalah seluruh upaya dalam hal kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa Pulantani dengan cara meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada. Dapat dilakukan dengan aktivitas dan dukungan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan primer masyarakat. Keempat, pembinaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah khususnya untuk membenahi dan menata kelembagaan masyarakat desa Pulantani supaya semakin baik dan berjalan sesuai yang diharapkan. Kegiatan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara meliputi pelatihan, pertemuan, lomba, dan lain-lain. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan berbagai cara: Pertama, observasi, dilakukan survey secara langsung ke lokasi penelitian di Desa Pulantani meliputi pencatatan objek yang diperlukan untuk mendukung penelitian. Kedua, wawancara, tanya jawab secara langsung dengan responden yang terdiri dari Kepala Desa Pulantani, Sekretaris desa Pulantani, dan masyarakat desa Pulantani. Kedua, kuesioner, dengan cara memberikan daftar pertanyaan dan/atau penjelasan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2013) dimana responden merupakan orang yang mengetahui atau berpengaruh dalam penelitian ini meliputi pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa Pulantani. Ketiga, Dokumentasi lapangan, dilakukan untuk mempermudah dalam kajian data selanjutnya. Dalam menganalisis data teknik yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Ketika penelitian dilapangan, peneliti telah menentukan 10 responden untuk melakukan wawancara. Responden tersebut terdiri dari 1 Kepala Desa Pulantani, 1 Sekretaris Desa Pulantani, 1 dari RT 001, 1 dari RT 002, 1 dari RT 003, 1 dari RT 004, 1 dari perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, 1 dari kader PKK, serta 2 dari perwakilan masyarakat desa Pulantani.

Mekanisme Perencanaan Penganggaran dan Alokasi Dana Desa Pulantani

Pertama, melaksanakan perencanaan draft; selanjutnya melaksanakan musyawarah desa yang terdiri dari musyawarah RPJMDes (periode kepala desa 6 tahun) dan musyawarah RKP/tahun (rencana kerja pembangunan desa), selanjutnya melaksanakan musrenbang kecamatan dan diusulkan ke kabupaten (penganggaran pengalokasian dana), dan terakhir Pelaksanaan serta Laporan penanggung jawaban dan evaluasi. Desa memiliki prioritas sesuai dengan peraturan Menteri keuangan, seperti masyarakat mengusulkan sebuah kegiatan, tapi pihak desa tidak bisa merealisasikan karena setiap tahun sudah ada aturan skala prioritas seperti persentase untuk ketahanan pangan, untuk bantuan langsung tunai dan lain-lain. Berikut dana desa Pulantani tahun 2019 sampai 2021 :

Tabel 1
Anggaran Dana Desa
Desa Pulantani tahun 2019-2021

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2019	Rp 753.300.000
2	2020	Rp 801.309.000
3	2021	Rp 1.096.669.000

Sumber : Sekdes Pulantani Kab.HSU

Analisis Prioritas Belanja Dana Desa pada Desa Wisata Pulantani Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tabel 2
Rata-rata Geometrik
Kriteria Alternatif

Informan	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa
1	7	9	6
2	7	8	6
3	9	8	7
4	7	9	6
5	7	8	6
6	7	8	6
7	8	7	6
8	7	8	5
9	8	7	6
10	8	7	5
Jumlah	542126592	910393344	48988800
Rata-rata geometriks	7,47	7,87	5,88

Sumber: Hasil Olah Data

Tabel 2 merupakan hasil dari nilai rata-rata geometric kriteria,pada bidang potensi desa dengan nilai paling besar 7,87 pembulatan 8, bidang RPJMDes dengan nilai 7,47 pembulatan 7, bidang permasalahan desa 5,88 pembulatan 6. Berdasarkan 10 responden memberikan nilai lebih besar pada bidang kriteria potensi desa, karena menurut responden dilapangan beranggapan bahwa kriteria potensi desa adalah sesuatu yang sangat berarti dalam meningkatkan ekonomi desa.

Tabel 3
Rata-rata Geometrik Alternatif
RPJMDes

Informan	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat
1	7	8	6	5
2	4	3	9	7
3	5	9	8	7
4	3	9	8	6
5	4	9	8	7
6	4	8	7	6
7	3	9	8	7
8	7	3	6	5
9	4	8	7	6
10	3	5	9	7
Jumlah	1693440	151165440	585252864	90757800
Rata-rata geometriks	4,20	6,58	7,53	6,25

Sumber: Hasil Olah Data

Pada tabel 3 merupakan hasil dari nilai rata-rata geometric pada kriteria alternatif bidang RPJMDES, nilai rata-rata geometric dari terbesar adalah bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan nilai 7,53 dibulatkan 8, bidang Pembangunan Desa dengan nilai 6,58 dibulatkan 7, bidang Pembinaan Masyarakat dengan nilai 6,25 dibulatkan 6, serta bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan nilai 4,20 dibulatkan 4. Dari 10 informan lebih banyak memberikan nilai yang besar untuk bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini dikarenakan responden beranggapan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan baik, akan tetapi sebagian informan memberikan nilai lebih besar untuk bidang pembangunan desa dengan alasan bahwa dengan meningkatkan pembangunan desa dengan bersama dapat bermanfaat tidak fokus disatu bidang saja.

Tabel 4
Rata-rata Geometrik Alternatif
Potensi Desa

Informan	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat
1	3	8	9	7
2	7	6	3	5
3	4	7	9	6
4	3	9	5	4
5	3	9	6	5
6	3	7	6	5
7	3	8	9	6
8	8	7	4	5
9	4	6	9	7
10	3	5	8	4
Jumlah	653184	320060160	100776960	17640000
Rata-rata geometriks	3,82	7,09	6,31	5,30

Sumber: Hasil Olah Data

Pada Tabel 4, kriteria untuk bidang potensi desa, nilai rata-rata geometrik daari terbesar adalah alternative bidang pembangunan desa dengan nilai 7,09 dibulatkan 7, bidang pemberdayaan masyarakat dengan nilai 6,31 dibulatkan 6, bidang pembinaan masyarakat dengan nilai 5,30 dibulatkan 5, serta bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan nilai 3,82 dibulatkan 4. Berdasarkan keterangan dari responden lebih banyak memberikan nilai yang lebih tinggi pada bidang pembangunan desa disebabkan untuk meningkatkan kualitas suatu potensi suatu desa, desa harus memiliki fasilitas yang baik dalam mendorong potensi desa yang ada seperti wisata di desa Pulantani.

Tabel 5
Rata-rata Geometrik Alternatif
Permasalahan Desa

Informan	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Masyarakat
1	3	9	8	6
2	8	4	7	6
3	4	9	6	7
4	3	8	5	4
5	3	9	8	6
6	3	9	7	5
7	7	8	6	5
8	4	6	9	7
9	5	9	8	7
10	3	9	8	6
Jumlah	1088640	816293376	325140480	44452800
Rata-rata geometriks	4,02	7,78	7,10	5,82

Sumber: Hasil Olah Data

Pada tabel 5 kriteria untuk bidang permasalahan desa, rata-rata geometric dari terbesar adalah alternative bidang pembangunan desa dengan nilai 7,78 dibulatkan 8, bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan nilai 7,10 dibulatkan 7, bidang pembinaan masyarakat dengan nilai 5,82 6,serta bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan nilai 4,02 dibulatkan 4. Berdasarkan respon dari informan rata-rata responden menjawab kuesioner bahwa pembangunan desa adalah salah satu seharusnya dapat diselesaikan supaya masyarakat dapat beraktfitaas dengan nyaman dikarenakan sarana dan prasarana di desa Pulantani masih harus dikembangkan untuk memajukan wisata dan perekonomian di desa Pulantani.

Tabel 6
Matriks Berpasangan
Kriteria Alternatif

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa
RPJMDes	1	0,5	2
Potensi Desa	2	1	3
Permasalahan Desa	0,5	0,3	1
Jumlah	3,50	1,83	6,00

Sumber: Hasil Olah Data

Pada tabel 6 merupakan matriks berpasangan yang membandingkan antara alternatif untuk dijadikan prioritas utama pada dana desa. Pertama, Potensi desa dibandingkan dengan permasalahan desa bernilai 3, yang berarti bahwa Potensi desa lebih sedikit penting daripada permasalahan desa. Kedua, potensi desa dibandingkan dengan RPJMDes memiliki bernilai 2, yang berarti bahwa RPJMDes dan potensi desa hampir sama-sama penting, tetapi potensi desa lebih penting sedikit daripada RPJMDes. Ketiga, RPJMDes dibandingkan permasalahan desa bernilai 2, artinya permasalahan desa sama penting dengan RPJMDes tetapi RPJMDes sedikit penting daripada potensi desa.

Penentuan Prioritas

Tabel 7
Eigen Vector untuk Kriteria

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa	Jumlah baris	Vektor Prioritas
RPJMDes	0,2857	0,2727	0,3333	0,8918	0,297
Potensi Desa	0,5714	0,5455	0,5000	1,6169	0,539

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa	Jumlah baris	Vektor Prioritas
Permasalahan Desa	0,1429	0,1818	0,1667	0,4913	0,164
					1,0000

Sumber: Hasil Olah Data

Nilai bobot (Eigen Vektor) dihasilkan dari nilai rata-rata masing-masing kriteria. Dengan menghasilkan nilai bobot RPJMDes: 0,297, Potensi desa: 0,539, Permasalahan desa: 0,164. Sehingga, nilai kriteria untuk bidang potensi desa lebih tinggi daripada bidang permasalahan desa maupun bidang RPJMDes.

Ratio Konsistensi

Tabel 8
Matriks
Ratio Konsisten

KRITERIA	RPJMDes	Potensi Desa	Permasalahan Desa	Jumlah baris
RPJMDes	0,297258	0,269481	0,327561	0,894300
Potensi Desa	0,594517	0,538961	0,491342	1,624820
Permasalahan Desa	0,148629	0,179654	0,163781	0,492063

Sumber: Hasil Olah Data

Perhitungan rasio konsistensi

$$\begin{pmatrix} 0,297 \\ 0,539 \\ 0,164 \end{pmatrix} : \begin{pmatrix} 0,894 \\ 1,625 \\ 0,492 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3,01 \\ 3,01 \\ 3,00 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_{maks} = \frac{3,01 + 3,01 + 3,00}{3} = 3,01$$

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n-1} = \frac{3,01-3}{3-1} = \frac{0,01}{2} = 0,0050$$

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

$$CR = \frac{0,0050}{0,58} = 0,0086$$

Hasil dari CR (Consistency Ratio) menghasilkan nilai 0,0086. Hal ini mengartikan bahwa hasil kuesioner yang disebarkan kepada responden bersifat konsisten, karena berdasarkan menurut professor Saaty, nilai CR (Consistency Ratio) dapat diterima atau layak jika nilainya kurang atau sama dengan 0,1.

Tabel 9
Maktriks
Perankingan Alternatif

	RPJMDES	Potensi Desa	Permasalahan Desa		Bobot Kriteria	Vektor Prioritas
Penyelenggaraan pemerintah desa	0,07	0,10	0,07		0,30	0,0862
Pembangunan desa	0,29	0,47	0,47	x	0,54	0,4160
Pemberdayaan masyarakat	0,47	0,28	0,29		0,16	0,3386
Pembinaan masyarakat	0,17	0,16	0,17			0,1654
		Jumlah				1,000

Sumber: Hasil Olah Data

Pada tabel 9 menghasilkan urutan prioritas dari perankingan alternatif menghasilkan, pertama, bidang Pembangunan Desa sebesar 41,60%, kedua adalah bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 33,86%, ketiga bidang Pembinaan Masyarakat sebesar 16,54%, dan terakhir bidang Pemerintahan Desa sebesar 8,62%.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah penelitian dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan. Pertama, mekanisme perencanaan penganggaran dana desa di desa Pulantani yaitu pertama melaksanakan perencanaan draft; selanjutnya melaksanakan musyawarah desa yang terdiri dari musyawarah RPJMDes (periode kepala desa 6 tahun) dan musyawarah RKP/tahun (rencana kerja pembangunan desa), selanjutnya melaksanakan musrenbang kecamatan dan diusulkan ke kabupaten (penganggaran pengalokasian dana), dan terakhir Pelaksanaan serta Laporan penanggung jawaban dan evaluasi. Kedua, alokasi dana desa pulantani tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 753.300.000, pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 801.309.000, dan pada tahun 2021 kembali meningkat yaitu sebesar Rp. 1.096.669.000. Ketiga, dari ketiga faktor atau kriteria: RPJMDes, potensi desa, permasalahan desa dihasilkan urutan prioritas belanja dana desa pertama yaitu Pembangunan desa 41,60%, kedua, Pemberdayaan masyarakat sebesar 33,94%, ketiga, Pembinaan Masyarakat sebesar 16,54%, kemudian terakhir Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 8,62% serta pemerintah desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD untuk mengembangkan potensi ekonomi wisata desa.

Saran

Pertama, perlunya untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan kriteria selain yang tercantum dipenelitian ini yang dapat digunakan dengan metode AHP, sehingga hasil penelitian selanjutnya semakin luas. Kedua, penggunaan belanja dana desa bisa terfokus ke potensi desa yaitu adanya ekowisata, karena akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya wisata tersebut. Ketiga, pengembangan ekowisata pada desa Pulantani dapat dilakukan dengan mengelola alokasi dana desa yang bersumber dari APBD, yang diinventarisir sebelumnya.

BIBLIOGRAPHY

- Apriliana, R. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. 1–171.
- Firdaus, I. H., Abdillah, G., & Renaldi, F. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik. Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2016 (SENTIKA 2016), 2016(Sentika), 440–445. <https://doi.org/10.1111/gcb.13996>
- Firdaus, M., Harmini, & M.A, F. (2011). *Aplikasi Metode Kuantitatif Untuk Manajemen Dan Bisnis*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Hafid, R. (2017). *Pemanfaatan Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*.
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Indonesia, R. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*.
- Indonesia, R. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*.
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, (2017).
- Putera, M. I. M., & Saleh, M. (2019). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sungai Batang Kecamatan Martapura

-
- Barat Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2 No.2, 547–565.
- Rakhmatullah, R. S. (2020). Analisis Prioritas Belanja Desa Pada Dana Desa Kayu Bawang Kabupaten Banjar. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 03 No. 1, 114–128.
- Rosalina, Okta (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making With The Analytic Hierarchy Process, *Int. J. Services Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2008.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cv Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Tahir, Erni (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
- Umar, M. H. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Edisi 2). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.